

EKSPLORASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS INFORMASI PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dwince Oktasari, Saiful, Nila Aprila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This study aims to review, discuss and prove the presentation of financial statements and the accessibility of financial information to the use of financial statement information. This research was conducted in the Provincial DPRD, Inspectorate and BPK with a total of 47 respondents. Data were collected using a research questionnaire and processed using multiple linear regression. The results showed that the financial statements and the accessibility of positive and significant information on the use of Bengkulu Province regional financial statement information. Hoping the better financial statement presentation and information accessibility will increase the use of financial statement information.

Keywords: Statement Presentation, Accountability, Use of Financial Statement Information

1. Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik yang digunakan oleh masyarakat, wakil rakyat dan pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja.

Safitri (2009) menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aliyah dan Aida (2012) menguji pengaruh penyajian pelaporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasilnya penyajian pelaporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Sande, 2013). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan

keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Bengkulu sudah memenuhi standar umum akuntansi pengelolaan keuangan daerah (Bengkuluinteraktif.com), namun informasi laporan keuangan tersebut belum disajikan secara lengkap di website resmi Pemda Provinsi Bengkulu sehingga aksesibilitas informasi laporan keuangan menjadi terbatas dan tidak dapat diakses secara terbuka (bengkuluprov.go.id/keuangan-daerah)

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agensi

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat di telaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Nugraheni dan Subaweh, 2008).

Penelitian ini mengasumsikan bahwa pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.2. Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2015) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 alinea 36 (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) dinyatakan bahwa pengguna atau pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

- Masyarakat
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- Pemerintah

2.3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, alinea 14, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa komponen- komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Governmental accounting Standard Board (GASB, 1998) tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik adalah:

- Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara public
- Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Fauziah (2017) mengemukakan keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

2.4. Aksesibilitas Informasi Keuangan

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Sande, 2013). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Sande, 2013).

2.5. Penelitian Terdahulu

Bandariy (2011), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Priest *et al* (1999) dalam Bandariy (2011) melakukan survey kepada pengguna aktual dan potensial atas laporan keuangan pemerintah daerah. Survey ini dilakukannya

dengan obyek pemerintah daerah di Western Australia. Steccolini (2002) menemukan hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas. Yuliarti (2003) telah melakukan penelitian tentang kebutuhan dan permintaan stakeholders akan informasi pelaporan keuangan pemerintah. Anondo (2004) menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Mulyana (2002) menemukan penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Rohman (2009) menunjukkan pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan dengan metode kuisioner. Safitri (2009) memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah Malaum, dkk (2018), membuktikan Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dan Pengaruh aksesibilitas terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

2.6. Pengembangan Hipotesis

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara sukarela.

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi laporan keuangan daerah.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibilitas pada pengguna potensial (Mulyana, 2006). Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas informasi keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah.

H2: Aksesibilitas informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi laporan keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan terstruktur dengan menggunakan metode survei yang menguji hipotesis dengan menggali pertanyaan investigasi tentang kinerja. Sumber data penelitian ini merupakan data primer. Data primer penelitian ini diperoleh dari

kuesioner yang berkaitan tentang persepsi kelompok pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dari jawaban kuesioner yang disebarakan kepada responden.

3.2. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menguji penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi terhadap penggunaan informasi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Bengkulu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah :Penggunaan Informasi Laporan Keuangan dan Variabel independennya adalah Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLK) dan .Aksesibilitas informasi keuangan (AIK)

3.3. Metode Pengambilan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2011).

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Adapun sampel pada penelitian ini adalah :

- Anggota DPRD
- Inspektorat daerah
- BPK

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survey dengan mendistribusikan kuesioner terhadap pengguna laporan keuangan pemerintah daerah kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Inspektorat dan BPK.

3.5. Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011). Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpangan data terhadap rata-ratanya (mean).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara OneShot atau pengukuran sekali saja.

Pengukuran OneShot hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$ (Nunnally, 1967).

Uji Validitas

Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2016). Uji signifikan ini membandingkan korelasi antara nilai masing-masing item pertanyaan dengan nilai total. Apabila besarnya nilai total koefisien item pertanyaan masing-masing melebihi nilai signifikan, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Cara

mengukur validitas konstruk yaitu dengan mencari korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan teknik korelasi produk moment. Untuk menguji koefisien korelasi tersebut maka menggunakan level signifikan 5%, jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan tersebut adalah valid (Ghozali, 2013).

Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini, gejala multikolinieritas dilihat dari: (1) nilai Tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah = mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1, dan mempunyai angka Tolerance mendekati 1. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah = nilai VIF yang tinggi (VIF=1 atau Tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah Tolerance 0,10 atau = nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2011).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, sumbu x adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisis (Ghozali, 2005)

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika telah ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan menilai data penelitian pada variabel tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Jika nilai probabilitas lebih besar 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tapi jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normal.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian- pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

X1 : Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 : Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah

a : Konstanta

b1 : sloperegresi atau koefisien regresi dari X1

b2 : sloperegresi atau koefisien regresi dari X2

e : kesalahan residual (errorturn)

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan regresi dengan tingkat signifikansi 5%. Analisis hasil regresi dilakukan berdasarkan.

- *Koefisien Determinasi (R^2)*. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r = +1$, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat.
- *Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)*. Uji signifikan simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). Jika hasil F test diperoleh nilai F hitung lebih besar dari df dan signifikansi jauh di bawah derajat kepercayaan yang ditentukan maka model regresi fit.
- *Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)*. Uji signifikansi parameter individual digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Deskriptif data penelitian

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu kuesioner yang ditujukan kepada perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan Auditor Inspektorat. Kuesioner disebarikan dengan google form (<https://forms.gle/cbSkGX6xYfoEg7iy5>) dan hard kuesioner. Untuk penyebaran kuesioner ke Auditor Inspektorat sesuai kesepakatan disebarikan dengan menggunakan hard kuesioner, sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi kuesioner disebarikan melalui link google form.

Table 1. Data Distribusi Sampel Penelitian

No.	Sampel	Jumlah kuisisioner
1.	Anggota DPRD Provinsi Bengkulu	2
2.	Auditor Inspektorat Provinsi Bengkulu	45
		47

Kuesioner didistribusikan (tabel 2) sebanyak 100 kuesioner, namun hanya sebanyak 64 kuesioner atau hanya 71,11 % kuesioner yang kembali. Dari 64 kuesioner tersebut sebanyak 47 atau sebesar 73,44 % kuesioner bisa diolah untuk menjadi data penelitian ini.

Table 2. Data Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah Kuesioner yang di distribusikan	100 Kuisisioner	100 %
Kuesioner yang kembali	64 Kuisisioner	71.11 %
Kuesioner yang tidak bisa diolah	17 Kuisisioner	26,56 %

Dari sebanyak 47 kuesioner yang bisa digunakan dalam penelitian ini, sebanyak 21 responden atau sebesar 44,7% usia > 40 tahun, sedangkan 20 responden atau 42,6% usia 31 s/d 39 Tahun dan sisanya 6 responden atau 12,8% usianya 20 s/d 30 Tahun. Dilihat dari jenis kelamin sebanyak 31 responden

atau 66% berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya sebanyak 16 orang atau sebesar 34 % berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari pendidikan terakhirnya, sebanyak 29 responden atau sebesar 61,7 % pendidikan terakhirnya adalah S1, sedangkan sebanyak 17 responden atau 36,2 % pendidikan terakhirnya adalah S2 dan sisanya 1 orang atau 2,1% pendidikan terakhirnya D3. Dilihat dari pekerjaannya, sebanyak 45 orang auditor di inspektorat atau 95,7% dan sisanya 2 orang atau 4,3% anggota DPRD.

Table 3. Statistik Deskripsi Responden

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Usia :		
20 s/d 30 Tahun	6	12,8%
31 s/d 39 Tahun	20	42,6%
> 40 Tahun	21	44,7%
Total	47	100%
Jenis Kelamin :		
Pria	16	34%
Wanita	31	66%
Total	47	100%
Pendidikan Terakhir:		
D3	1	2,1%
S1	29	61.7%
S2	17	36,2%
Total	47	100%
Pekerjaan:		
Anggota Dewan	2	4,3%
Inspektorat	45	95,7%
Total	47	100%

4.2. Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini seperti penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi, dan penggunaan informasi laporan keuangan maka digunakan tabel statistik deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis, kisaran sesungguhnya, median, rata-rata (mean) dan standar deviasi yang dapat disajikan dalam Tabel 4.

Table 4. Statistik Deskriptif

Variabel	Rentang Teoritis	Rata-rata Teoritis	Standar deviasi	Rentang Aktual	Mean
Penyajian Laporan Keuangan	18 – 90	54	7,005	53 -90	72,57
Aksesibilitas Informasi Keuangan	6 – 30	18	2,422	18 – 30	24,49
Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	6 – 30	18	1,787	22 -30	24,64

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel dari 47 responden. Variabel penyajian laporan keuangan terdiri dari 18 pertanyaan pada skala Likert 5 poin. Dari 47 responden dihasilkan kisaran aktual 53 - 90, artinya penyajian laporan keuangan yang berada pada kisaran 53 merupakan nilai terendah dari kisaran aktual sedangkan 90 merupakan nilai tertinggi dari penyajian laporan keuangan. Sedangkan rentang teoritis yang mungkin terjadi adalah antara 18 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 90 (menunjukkan nilai yang paling tinggi).

Mean untuk variabel penyajian laporan keuangan adalah 72,57 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 54. Karena mean lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan dari jawaban responden setuju bahwa penyajian laporan keuangan disajikan secara jujur, andal dan tepat waktu.

Variabel aksesibilitas informasi diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 pertanyaan. Seperti terlihat pada Tabel 4.3 dari 47 responden dihasilkan kisaran aktual 18 - 30, artinya aksesibilitas informasi yang kurang berada pada kisaran 18 dan tingkat aksesibilitas informasi yang lebih tinggi berada pada kisaran 30. Sedangkan kisaran teoritis yang terjadi adalah antara 6 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 30 (menunjukkan nilai yang paling tinggi).

Rata-rata aktual (mean) untuk seluruh responden adalah 24,49 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 18. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas informasi yang dijawab responden setuju bahwa laporan keuangan pemerintah daerah dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Variabel penggunaan informasi laporan keuangan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 6 pertanyaan. Dari 47 responden dihasilkan kisaran aktual 22 - 30, artinya tingkat penggunaan informasi laporan keuangan yang kurang berada pada kisaran 22 dan tingkat penggunaan informasi laporan keuangan yang lebih tinggi berada pada kisaran 30. Sedangkan rentang teoritis yang terjadi adalah antara 6 (menunjukkan nilai yang paling rendah) sampai 30 (menunjukkan nilai yang paling tinggi).

Nilai mean untuk seluruh responden adalah 24,64 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 18. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan informasi laporan keuangan yang dijawab responden setuju Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan anggaran tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, jawaban responden pada masing-masing variabel terlihat memberikan informasi yang menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian ini, yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi, dan penggunaan informasi laporan keuangan cenderung masuk kategori jawaban responden yang setuju. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata aktual seluruh variabel yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata teoritis tiap variabel. Berarti sebagian besar responden memberikan jawaban pada setiap item pertanyaan dengan skala besar.

4.3. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: (1) Uji Validitas Data dan (2) Hasil Uji Reliabilitas. Berdasarkan Tabel 5 dibawah ini, semua item pernyataan untuk variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi dan penggunaan informasi laporan keuangan memiliki nilai Pearson Correlation positif dan apabila nilai positif dan r hitung $>$ r tabel, maka dapat dinyatakan valid dan signifikan masing-masing variabel 0,000 maka, dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk digunakan pada pengujian selanjutnya.

Table 5. Hasil Pengujian Validitas

No.	Variabel	r – hitung	Sig.	Keterangan
1	Aksesibilitas Informasi Laporan Keuangan			
	AIK 1	0,890	0,000	Valid
	AIK 2	0,931	0,000	Valid
	AIK 3	0,845	0,000	Valid
	AIK 4	0,893	0,000	Valid
	AIK 5	0,879	0,000	Valid
	AIK 6	0,926	0,000	Valid
2	Penyajian Laporan Keuangan			
	PLK 1	0,668	0,000	Valid
	PLK 2	0,704	0,000	Valid
	PLK 3	0,737	0,000	Valid
	PLK 4	0,740	0,000	Valid
	PLK 5	0,723	0,000	Valid
	PLK 6	0,726	0,000	Valid
	PLK 7	0,782	0,000	Valid
	PLK 8	0,890	0,000	Valid
	PLK 9	0,855	0,000	Valid
	PLK 10	0,868	0,000	Valid
	PLK 11	0,845	0,000	Valid
	PLK 12	0,857	0,000	Valid
	PLK 13	0,715	0,000	Valid
	PLK 14	0,738	0,000	Valid
	PLK 15	0,640	0,000	Valid
	PLK 16	0,612	0,000	Valid
	PLK 17	0,568	0,000	Valid
	PLK 18	0,700	0,000	Valid
3	Penggunaan Informasi Keuangan Daerah			
	PIK 1	0,772	0,000	Valid
	PIK 2	0,742	0,000	Valid
	PIK 3	0,908	0,000	Valid
	PIK 1	0,772	0,000	Valid
	PIK 2	0,742	0,000	Valid
	PIK 3	0,908	0,000	Valid

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan sebagaimana terangkum pada Tabel 6 diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach's alpha semua variabel penelitian lebih besar dari nilai 0,60 jadi tidak ada masalah pada uji reliabilitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen atau variabel penelitian adalah reliabel.

Table 6. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No.	Variabel	Nilai Cronbach' Alpha	Keterangan
1	Aksesibilitas Informasi Keuangan	0,949	Reliabel
2	Penyajian Laporan Keuangan	0,953	Reliabel
3	Penggunaan Informasi Keuangan Daerah	0,884	Reliabel

4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorof-Smirnov Test. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Tabel 7. Dari Tabel 7 dibawah ini terlihat bahwa unstandardized residual memiliki nilai Asymp Sig

sebesar 0,078 yang lebih besar dari 0,05 , sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Table 7. Hasil Pengujian Normalitas Data

<i>Asymp Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
0,078	Normal

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan Tabel 8 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas (Asymp.Sig.) variabel Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 artinya semua variabel independen yang saya teliti bersifat varian yang homogen (bebas heteroskedastisitas).

Table 8. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Data

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	0,752	Bebas Heteroskedastisitas
Aksesibilitas Informasi Keuangan	0,136	Bebas Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Apabila nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya tidak terjadi multikolinieritas antara variabel apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini :

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari Tolerance Value dan Variance Inflation (VIF). Berdasarkan penjelasan tabel dibawah ini, disimpulkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel penelitian > 0,10 dan nilai VIF < 10 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model persamaan regresi.

Table 9. Hasil Pengujian Multikolinieritas Data

Variabel	<i>Collenearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Penyajian Laporan Keuangan	0,600	1,668	Bebas Multikolinieritas
Aksesibilitas Informasi Keuangan	0,600	1,668	Bebas Multikolinieritas

4.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (regression analysis) dalam menguji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis 1 dan 2 dapat terlihat pada Tabel 10.

Table 10. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien b	t-statistik	Sig.
Penyajian Laporan Keuangan	0,078	2,255	0,029
<i>R Square</i>	0,512		
<i>Adjusted R2</i>	0,490		
F	23,069		
Sig.	0,000		

Hipotesis pertama, menyatakan variabel Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Daerah dengan memberikan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,078 dengan perhitungan signifikan sebesar $0,029 < 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Daerah. Artinya semakin baik Penyajian Laporan Keuangan maka Penggunaan Informasi Keuangan Daerah semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Hipotesis kedua, menyatakan variabel Aksesibilitas Informasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah dengan memberikan hasil perhitungan nilai koefisien sebesar 0,355 dengan perhitungan signifikan sebesar $0,001 < 0,050$. Hal ini menunjukkan bahwa Aksesibilitas Informasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Artinya semakin baik Aksesibilitas Informasi Keuangan maka Penggunaan Informasi Keuangan Daerah semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai statistik F dalam model adalah sebesar 23,069 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,050 menunjukkan bahwa secara bersama sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Adj R Square model regresi sebesar 0,490 yang menunjukkan bahwa 49 % variasi dari penggunaan informasi keuangan daerah dijelaskan melalui penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi keuangan, sedangkan sisanya sebesar 51% dijelaskan oleh variasi atau perubahan lain yang tidak terdapat dalam persamaan ini. Hal ini membuktikan bahwa pada penelitian ini variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi keuangan sebagai variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen pada penelitian ini, yaitu penggunaan informasi keuangan daerah.

4.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi laporan keuangan. Hal itu berarti bahwa semakin berkualitas atau semakin tepat waktu, andal dan jujur penyajian laporan keuangan maka akan semakin baik tingkat penggunaan informasi laporan keuangan tersebut. Dan diharapkan penyusunan laporan keuangan bisa semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil statistik deskriptif jawaban responden rata-rata setuju bahwa penyajian laporan keuangan harus disajikan secara jujur.

Kebutuhan informasi masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan tentunya berbeda, anggota DPRD selaku Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewangan keuangan Negara, sedangkan auditor menggunakan informasi laporan keuangan untuk menilai kewajaran atau kelayakkan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Malaum I, dkk (2018) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan. Dari hasil statistik deskriptif jawaban responden rata-rata setuju bahwa laporan keuangan dapat diakses secara terbuka untuk pengguna

laporan informasi keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan menentukan anggaran tahun berikutnya.

Penelitian ini mendukung teori agensi menyatakan apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi laporan keuangan. Dalam bentuk aksesibilitas informasi laporan keuangan. Setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD), Laporan Keuangan Pemerintah ini selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pengguna laporan keuangan sekaligus pemilik dana yang digunakan oleh pemerintah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rohman (2009), yang mengungkapkan bahwa penyajian adalah aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman, 2009).

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Penggunaan informasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu akan meningkatkan penggunaan informasi laporan keuangan.
- Aksesibilitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin baik aksesibilitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, akan meningkatkan penggunaan informasi laporan keuangan.

5.2. Implikasi Penelitian

Penelitian ini mampu membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi laporan keuangan. Hasil ini mendukung teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana pemerintah sebagai agen telah menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan akses secara terbuka kepada para pengguna informasi laporan keuangan

Penelitian ini menjadi masukan bagi organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah yang terkait dengan penggunaan informasi laporan keuangan, agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan. Ketika penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas informasi berpengaruh terhadap penggunaan informasi laporan keuangan, yang berguna bagi pengguna informasi dengan adanya kemudahan aksesibilitas informasi keuangan pemerintah daerah untuk referensi dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar transparan dan akuntabilitas, yang dapat dilakukan dengan mulai meningkatkan keterampilan atau pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

References

- Aliyah Siti dan Aida N.(2012). Pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*.Vol.8 No. 2. Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara
- Anondo, Daru. (2004). Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagai Bagian Perwujudan Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta
- Arfianti, Dita. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Arumanti, Nur Rahma (2018). Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gowa. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar
- Bandariy, Himmah (2011) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas). Universitas Diponegoro Semarang
- Bengkulu Interaktif .Pemprov Bengkulu Kembali Raih Opini WTP dari BPK <https://www.bengkuluinteraktif.com>
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. <https://bengkuluprov.go.id/keuangandaerah> Diakses pada tanggal : 29 Juni 2020
- Fauziyah, Miftahul Reza. (2017). Pengaruh Penyajian dan Akseibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6): 1-16.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Governmental Accounting Standars Boards (GASB) (1998). Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis For State and Local Government. Norwalk
- LAN dan BPKP (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta : LAN RI
- Malaum, I, Laan, R, & Yusuf, A. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Di Kabupaten Alor
- Mardiasmo. (2015). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1): 1-17.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyana,B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Nugraheni P dan Subaweh I, (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan . *Jurnal Ekonomi Bisnis* No.1 Vol 13, April 2008
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Ratna, Safitri. (2009). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang).Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Republik Indonesia. Undang- undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Rohman,Abdul (2009). Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di JawaTengah). *Jurnal MAKSI*. Vol.7 NO.2. Hal. 105-220. Agustus 2007.
- Rohman, Arif. (2009). Politik Ideologi Pendidikan .Mediatama.Yogyakarta.
- Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan danTimeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1(1).
- Sande, Peggy.(2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Study Empiris pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat). Skripsi, jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Sekaran,Uma.(2006). Research Methods For Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiana,Elizabeth (2017). Kajian Pustaka Tentang Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Universitas Jember* Hal. 151-157
- Solihin, Ismail.(2008). Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Jakarta:Salemba Empat
- Steccolini, Ileana. (2002). Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002.
- Sudjana, (2002). Metode Statistika, Bandung. Tarsito
- Ulum, Ihyaul, (2004). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Penerbit UMM PRESS
- Yulianti, Gusti Ayu Putu (2003). Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia : Suatu Studi Eksploratif mengenai Kebutuhan dan Permintaan Stakeholder akan Informasi Keuangan Pemerintah . Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta